

***Public Space Development Model After Large-Scale Slum Area Revitalization  
in Maros Regency: A Case Study of Allepolea and Maccini Baji Areas, Lau  
District***

**Model Pengembangan Ruang Publik Pasca Penataan Kawasan Kumuh Skala  
Besar di Kabupaten Maros: Studi Kasus Kawasan Allepolea dan Maccini  
Baji, Kecamatan Lau**

Muhammad Akshar<sup>1</sup>, Muhammad Aryanugraha Ismajaya<sup>2</sup>

Prodi Rekayasa Kayu, Politeknik Pertanian Negeri Samarinda<sup>1</sup>, Prodi Arsitektur, Universitas Negeri  
Makassar<sup>2</sup>

[1muhammadin.akshar@gmail.com](mailto:muhammadin.akshar@gmail.com), [2muh.aryanugraha.ismajaya@unm.ac.id](mailto:muh.aryanugraha.ismajaya@unm.ac.id)

**Abstrak:** Penataan kawasan kumuh merupakan salah satu strategi penting dalam mewujudkan lingkungan permukiman yang layak, sehat, dan berkelanjutan. Namun, pasca penataan, sering kali muncul kekosongan fungsi sosial di kawasan tersebut akibat belum optimalnya pemanfaatan ruang publik. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model pengembangan ruang publik yang inklusif dan adaptif di kawasan pasca penataan kumuh skala besar, dengan studi kasus di kawasan Allepolea dan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros yang memiliki luas kawasan kumuh sebesar 17,23 hektare. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan, wawancara mendalam, survei kuesioner, dan telaah dokumen perencanaan (RTRW 2022–2042). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak akan ruang publik yang mampu mengakomodasi aktivitas sosial, ekonomi informal, serta interaksi antarwarga. Berdasarkan hasil analisis, dirumuskan sebuah model alternatif ruang publik berbasis kebutuhan lokal yang mencakup aspek fungsional, ekologis, dan sosial-budaya. Model ini diharapkan dapat menjadi acuan perencanaan ruang publik di kawasan permukiman yang telah ditata, baik di Maros maupun di wilayah serupa lainnya.

Kata Kunci: ruang publik, penataan kawasan kumuh, perencanaan kota, partisipasi masyarakat, Kabupaten Maros

**Abstract:** The arrangement of slum areas is one of the important strategies in realizing a livable, healthy, and sustainable residential environment. However, after the arrangement, there is often a vacancy in social functions in the area due to the suboptimal utilization of public spaces. This study aims to formulate a model for the development of inclusive and adaptive public spaces in large-scale post-slum arrangement areas, using case studies in the Allepolea and Maccini Baji areas, Lau District, Maros Regency, which have a total slum area of 17.23 hectares. The research method used is a qualitative-descriptive approach with data collection techniques including field observation, in-depth interviews, questionnaire surveys, and a review of planning documents (RTRW 2022–2042). The results show that there is an urgent need for public spaces that can accommodate social activities, informal economic activities, and interactions between residents. Based on the analysis, an alternative model for public spaces based on local needs is formulated, which includes functional, ecological, and socio-cultural aspects. This model is expected to serve as a reference for planning public spaces in residential areas that have been arranged, both in Maros and in other similar areas.

Keywords: public space, slum area arrangement, urban planning, community participation, Maros Regency

## Pendahuluan

Kawasan kumuh masih menjadi permasalahan signifikan dalam proses pembangunan kota di Indonesia. Permukiman yang tidak layak, padat, dan tidak tertata dengan baik tidak hanya berdampak pada kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mengganggu fungsi lingkungan secara keseluruhan. Pemerintah Kabupaten Maros, dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2022–2042, mengidentifikasi beberapa wilayah yang memiliki kawasan kumuh skala besar, salah satunya adalah kawasan Allepolea dan Maccini Baji di Kecamatan Lau yang memiliki luas mencapai 17,23 hektare (matamaros, 2023). Pemerintah berkomitmen untuk melakukan penataan terhadap kawasan-kawasan ini melalui pendekatan terpadu, yang tidak hanya mencakup perbaikan infrastruktur fisik, tetapi juga peningkatan kualitas lingkungan sosial dan spasial. Namun demikian, penataan kawasan kumuh sering kali hanya berfokus pada aspek fisik seperti drainase, jalan, dan sanitasi, sementara pemenuhan fungsi sosial ruang, khususnya melalui ruang publik, belum menjadi prioritas utama. Padahal, ruang publik memiliki peran penting dalam membangun kembali interaksi sosial, inklusivitas, serta memberikan identitas baru bagi kawasan yang telah ditata.

Beberapa studi menunjukkan bahwa keberadaan ruang publik yang dirancang dengan baik mampu meningkatkan kohesi sosial, memperkuat ekonomi lokal, serta mendorong keterlibatan warga dalam menjaga lingkungan (Astutik & Suharto, 2025; Hartanti et al., 2025; Prabowo et al., 2025). Penelitian oleh (Bevani et al., 2025; Rahman et al., 2009; Sasoko & Boangmanalu, 2024) menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam merancang ruang publik pasca relokasi atau penataan permukiman. Selain itu, pendekatan berbasis konteks lokal juga banyak disoroti dalam literatur, seperti yang dikemukakan oleh (Aliyah, 2019; Ayu & Alibasyah, 2019; Gazali, 2017; Laksitarini et al., 2021) yang menyatakan bahwa ruang publik harus merepresentasikan kebutuhan dan budaya masyarakat setempat agar dapat diterima dan dimanfaatkan secara optimal.

Ruang publik juga memiliki peran yang krusial dalam memperkuat identitas sosial suatu kawasan. Sebagaimana diungkapkan (Marselino, 2022; Politik et al., 2023; Rachmawati & Aji, 2023; Widiastuti, 2016), ruang publik yang hidup dan interaktif dapat menciptakan rasa kepemilikan di kalangan warga, yang pada gilirannya berkontribusi pada pemeliharaan dan keberlanjutan kawasan tersebut. Hal ini relevan dalam konteks kawasan pasca penataan, di mana masyarakat seringkali merasa kehilangan identitas akibat perubahan fisik yang drastis. Oleh karena itu, ruang publik yang dihasilkan harus mampu mempertahankan elemen-elemen budaya lokal yang menjadi ciri khas wilayah tersebut, sekaligus memenuhi kebutuhan sosial yang berkembang. Selain itu, literatur juga menekankan pentingnya keberlanjutan dalam desain ruang publik, terutama dalam kaitannya dengan dampak lingkungan. Menurut (Amri Perangin Angin, 2024; Anggaran Biaya Untuk Pembangunan Pasar Dengan Fasilitas Ramah Lingkungan Kelurahan Talang Putri Ilham Akbari & Rosyad, 2025; Kusumowidagdo, 2005; Oktarina et al., 2024), desain yang ramah lingkungan dan berkelanjutan tidak hanya mendukung kualitas hidup, tetapi juga mengurangi jejak karbon dan memperbaiki kualitas ekosistem lokal. Dalam konteks kawasan kumuh yang telah ditata, ruang publik yang berkelanjutan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas lingkungan secara keseluruhan, mengurangi polusi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keberlanjutan alam.

Ruang publik juga berperan penting dalam menciptakan inklusivitas sosial, di mana semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal, dapat merasa dihargai dan diberdayakan. Penelitian oleh (Denni Setiawan, 2020; Effendy, 2014; Pengabdian Masyarakat Ichsan Sidenreng Rappang et al., 2024; Pramesti1 et al., 2019) menunjukkan bahwa ruang publik yang terbuka dan mudah diakses dapat meningkatkan rasa kepercayaan antarwarga serta memperkuat integrasi sosial. Di kawasan kumuh yang telah ditata, penting untuk memastikan bahwa ruang publik tidak hanya terbatas pada ruang fisik, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dalam pengelolaannya, sehingga dapat menciptakan ruang yang benar-benar inklusif untuk semua kalangan. Dalam konteks penataan kawasan kumuh, desain ruang

publik juga harus mempertimbangkan aspek ekonomi lokal. Sebagai contoh, penelitian oleh (Keadilan & Jurnal, 2018; Nugroho et al., 2024; Purwanto, 2014) menunjukkan bahwa ruang publik yang dirancang dengan memperhatikan kegiatan ekonomi informal, seperti pasar atau kios-kios kecil, dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar, terutama dalam meningkatkan mata pencaharian mereka. Oleh karena itu, dalam merancang ruang publik pasca penataan kawasan kumuh, perlu ada integrasi antara ruang untuk aktivitas sosial dan ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat lokal.

Keberlanjutan ruang publik juga harus menjadi perhatian utama dalam pengembangannya. Penelitian oleh (Ardiansyah Pulungan, 2024; Manoto Sinambela, 2024; Rito, 2024) menggarisbawahi pentingnya desain ruang publik yang mendukung aktivitas jangka panjang, dengan menciptakan ruang yang dapat digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat, baik untuk kegiatan sosial, rekreasi, maupun ekonomi. Ruang publik yang dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang tidak hanya akan memperbaiki kualitas hidup masyarakat, tetapi juga meningkatkan ketahanan sosial dan lingkungan. Sebagai contoh, penggunaan material yang ramah lingkungan dan sistem drainase yang efisien dapat membantu mencegah kerusakan akibat bencana alam, serta mengurangi biaya pemeliharaan ruang publik. Dengan demikian, ruang publik yang berkelanjutan akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat, serta memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perencanaan ruang publik pasca penataan kawasan kumuh harus memadukan prinsip keberlanjutan, inklusivitas sosial, dan pemanfaatan ekonomi lokal untuk mencapai kesejahteraan bersama yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian mengenai kualitas pencahayaan buatan di ruang kelas dan evaluasi purna huni pada bangunan PDAM juga menunjukkan pentingnya aspek lingkungan dalam mendukung kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat (Baharuddin et al., 2025; Haq et al., 2023; Haq, Asrini, et al., 2024; Haq, Kamaruddin, et al., 2024; Haq & Nur, 2024; Haq<sup>1</sup> et al., 2024).

Meskipun telah banyak kajian mengenai penataan kawasan kumuh dan ruang publik secara umum, penelitian yang secara spesifik membahas pengembangan model ruang publik pasca penataan kawasan kumuh skala besar di daerah non-metropolitan seperti Kabupaten Maros masih terbatas. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu belum mengintegrasikan pendekatan spasial, partisipatif, dan sosial secara menyeluruh dalam merumuskan model ruang publik untuk kawasan pasca penataan. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan utama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah terkait dengan kondisi fisik dan sosial kawasan Allepolea dan Maccini Baji setelah penataan kawasan kumuh. Hal ini mencakup evaluasi terhadap perubahan yang terjadi di kawasan tersebut, baik dari segi infrastruktur fisik maupun dinamika sosial masyarakat yang terbentuk pasca relokasi dan penataan.

Penelitian ini juga akan mengkaji kebutuhan dan preferensi masyarakat setempat terhadap ruang publik yang ada di kawasan tersebut pasca penataan. Pertanyaan kunci yang akan dijawab adalah bagaimana model ruang publik yang sesuai untuk dikembangkan pada kawasan pasca penataan kumuh skala besar di Kabupaten Maros, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar fisik tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ruang publik yang berkelanjutan di kawasan yang telah ditata, serta bagaimana mengintegrasikan perspektif lokal dan kebijakan pemerintah dalam merancang ruang publik yang lebih inklusif dan adaptif. Dengan begitu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam merumuskan kebijakan dan desain ruang publik di kawasan kumuh yang telah ditata di daerah-daerah lain yang memiliki konteks serupa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi eksisting kawasan Allepolea dan Maccini Baji setelah dilakukan penataan kawasan kumuh. Analisis ini mencakup aspek fisik, sosial, dan lingkungan yang mengalami perubahan pasca intervensi pemerintah, serta sejauh mana perubahan tersebut berdampak terhadap kehidupan masyarakat setempat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan, persepsi, dan aspirasi masyarakat terhadap ruang publik di kawasan

tersebut. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, penelitian ini akan merumuskan model pengembangan ruang publik yang bersifat inklusif, adaptif, dan kontekstual, dengan mempertimbangkan potensi lokal serta karakter sosial budaya masyarakat di kawasan penelitian.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan dan memahami kondisi fisik serta sosial kawasan pasca penataan permukiman kumuh di Kabupaten Maros, khususnya di kawasan Allepolea dan Maccini Baji. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendalami interaksi sosial dan dinamika masyarakat terhadap ruang publik yang telah ditata serta merumuskan model ruang publik yang sesuai dengan karakteristik lokal dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, di mana kawasan Allepolea dan Maccini Baji memiliki luas kawasan kumuh sebesar 17,23 hektare yang merupakan bagian dari rencana penataan permukiman kumuh oleh pemerintah daerah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Maros tahun 2022-2042. Penelitian ini akan fokus pada pengembangan model ruang publik pasca penataan kawasan kumuh skala besar, yang mempertimbangkan aspek fisik, sosial, dan budaya masyarakat setempat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup beberapa metode yang saling melengkapi, antara lain observasi lapangan, wawancara mendalam, survei kuesioner, dan studi dokumentasi. Observasi lapangan dilakukan untuk memperoleh data langsung mengenai kondisi fisik kawasan dan pemanfaatan ruang publik yang ada, termasuk aktivitas masyarakat, kualitas lingkungan, dan interaksi sosial yang terjadi di ruang tersebut. Selain itu, observasi juga bertujuan untuk menggali potensi pengembangan ruang publik yang ada dengan memperhatikan elemen-elemen sosial dan budaya yang dapat diterapkan dalam desain ruang. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat setempat, tokoh masyarakat, perangkat desa, serta pejabat pemerintah daerah. Wawancara ini bertujuan untuk menggali persepsi, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat terkait dengan ruang publik yang ada dan yang diinginkan pasca penataan. Wawancara ini juga akan memberikan wawasan mengenai tantangan yang dihadapi masyarakat dalam memanfaatkan ruang publik yang telah ada serta peran pemerintah dalam perencanaan ruang publik di kawasan tersebut. Selain itu, survei kuesioner akan dilakukan untuk memperoleh data kuantitatif mengenai preferensi dan kebutuhan warga terhadap desain dan fungsi ruang publik. Survei ini akan mencakup pertanyaan tentang jenis aktivitas yang ingin dilakukan di ruang publik, fasilitas yang diinginkan, serta kualitas ruang publik yang diharapkan oleh masyarakat. Studi dokumentasi akan dilakukan untuk meninjau dokumen-dokumen perencanaan yang relevan, seperti RTRW Kabupaten Maros, laporan penataan kawasan kumuh, serta dokumen perencanaan ruang publik yang telah disusun oleh pemerintah daerah. Studi ini bertujuan untuk memahami kebijakan dan perencanaan terkait penataan kawasan kumuh dan ruang publik serta untuk memperoleh informasi tambahan yang dapat memperkaya analisis.

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan utama, yaitu analisis tematik dan pemetaan spasial. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan survei kuesioner akan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan tematik, di mana peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data, seperti persepsi masyarakat terhadap ruang publik, kebutuhan akan fasilitas tertentu, serta harapan mereka terhadap kualitas ruang publik di kawasan pasca penataan. Hasil analisis tematik ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat memandang ruang publik dan apa saja yang mereka harapkan dari ruang publik yang ada. Selain itu, data dari survei dan observasi lapangan akan dianalisis dengan pemetaan spasial untuk menggambarkan distribusi dan kondisi ruang publik yang ada di kawasan tersebut. Pemetaan ini akan memperlihatkan area-area yang sudah memiliki ruang publik yang memadai dan area-area yang membutuhkan pengembangan atau perbaikan. Pemetaan spasial juga akan membantu dalam

merumuskan model ruang publik yang dapat diimplementasikan di kawasan tersebut, dengan mempertimbangkan distribusi ruang, aksesibilitas, dan fungsi ruang yang diinginkan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis tematik dan pemetaan spasial, peneliti akan merumuskan model alternatif ruang publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, potensi lokal, dan kondisi sosial budaya di kawasan tersebut. Model ini akan mencakup desain ruang publik yang mengakomodasi berbagai aktivitas sosial dan ekonomi, seperti area rekreasi, fasilitas publik, ruang untuk kegiatan komunitas, serta elemen-elemen yang mencerminkan budaya lokal. Model yang dihasilkan diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik dan sosial, tetapi juga memperkuat hubungan antarwarga dan menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi, yang menggabungkan berbagai sumber data untuk mengonfirmasi temuan penelitian. Triangulasi ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan survei kuesioner untuk memperoleh kesimpulan yang lebih akurat dan komprehensif. Selain itu, verifikasi data dengan informan kunci akan dilakukan untuk memastikan konsistensi data yang diperoleh dan untuk menghindari bias dalam interpretasi data. Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama enam bulan, dengan tahap pengumpulan data yang berlangsung selama tiga bulan pertama, dan diikuti dengan tahap analisis data serta penyusunan laporan akhir selama tiga bulan berikutnya.

## Hasil Dan Pembahasan

Pada bagian ini, akan dibahas mengenai kondisi fisik dan sosial pasca penataan kawasan kumuh di kawasan Allepolea dan Maccini Baji, Kecamatan Lau. Penataan kawasan kumuh bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosial masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Proses ini mencakup pembenahan infrastruktur dasar dan penyediaan fasilitas publik yang dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Hasil observasi lapangan menunjukkan adanya perubahan yang signifikan pada kondisi fisik ruang publik, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diperhatikan, seperti keterbatasan akses ke infrastruktur yang memadai di beberapa area, serta tantangan dalam memaksimalkan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, pembahasan ini akan mengeksplorasi lebih dalam mengenai perubahan yang terjadi, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan untuk memastikan penataan kawasan kumuh benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sekitar.

### 1. Kondisi Fisik dan Sosial Pasca Penataan Kawasan Kumuh

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa pasca penataan kawasan kumuh di kawasan Allepolea dan Maccini Baji, terdapat peningkatan signifikan dalam kualitas fisik ruang publik, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Penataan kawasan kumuh telah mencakup pembenahan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, serta penyediaan fasilitas umum seperti tempat sampah dan lampu penerangan. Namun, masih terdapat beberapa area yang kurang terjangkau dengan infrastruktur yang memadai, terutama di zona-zona yang lebih padat penduduknya. Di kawasan Allepolea, meskipun telah ada area ruang terbuka hijau, ruang publik tersebut belum sepenuhnya digunakan secara optimal oleh masyarakat, karena kurangnya fasilitas pendukung dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat ruang terbuka. Di sisi lain, Maccini Baji menunjukkan potensi yang lebih besar dalam pemanfaatan ruang publik berkat adanya fasilitas sosial seperti tempat bermain anak dan taman kecil yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas komunitas. Kondisi Allepolea dan Maccini Baji dapat dilihat pada gambar 1



**Gambar 1.** Kondisi Allepolea dan Maccini Baji  
Sumber: Google Maps

Dari sisi sosial, masyarakat menunjukkan adanya perubahan dalam cara mereka memanfaatkan ruang publik. Sebagian besar responden dalam wawancara menyatakan bahwa mereka merasa lebih nyaman dan aman di ruang publik yang telah ditata, terutama dengan adanya lampu jalan dan saluran drainase yang lebih baik. Namun, masih ada tantangan dalam hal pemeliharaan ruang publik dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam merawat fasilitas umum. Meskipun terdapat kesadaran yang lebih tinggi mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kenyamanan ruang publik, banyak warga yang masih kurang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemeliharaan secara berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai pentingnya peran mereka dalam menjaga kualitas ruang publik serta kurangnya fasilitas pendukung untuk kegiatan gotong royong.

Selain itu, adanya fragmentasi sosial yang cukup mencolok antara warga yang lebih berdaya dan mereka yang masih tergolong dalam kelompok rentan, seperti keluarga berpenghasilan rendah, menjadi tantangan tersendiri. Meski sebagian masyarakat merasa lebih nyaman dengan adanya penataan ruang publik, sebagian lainnya merasa terpinggirkan, karena akses terhadap fasilitas sosial dan ekonomi yang lebih baik masih terbatas. Pada beberapa titik, masalah aksesibilitas ekonomi dan kesenjangan sosial semakin memperlebar jarak antara kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyeimbangkan distribusi fasilitas dan menciptakan ruang yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pada sisi positifnya, penataan ruang publik juga memberikan peluang untuk pengembangan ekonomi lokal. Di Maccini Baji, misalnya, keberadaan taman dan area terbuka hijau yang lebih baik memberikan ruang bagi warga untuk berinteraksi dan menjalankan aktivitas ekonomi seperti berdagang atau menyelenggarakan pasar kecil. Aktivitas ini dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi warga setempat. Pengembangan ruang publik yang dilengkapi dengan fasilitas

sosial seperti tempat berjualan dan fasilitas umum lainnya diharapkan dapat meningkatkan aktivitas sosial dan ekonomi di sekitar kawasan tersebut. Masyarakat juga mulai mengerti pentingnya aktivitas ekonomi kreatif, seperti seni, budaya, dan kerajinan tangan, sebagai bagian dari pemanfaatan ruang publik yang berkelanjutan.

## 2. Preferensi Masyarakat terhadap Ruang Publik

Dari hasil survei kuesioner, sebagian besar masyarakat di kawasan Allepolea dan Maccini Baji menginginkan ruang publik yang lebih multifungsi. Masyarakat menginginkan ruang publik yang tidak hanya digunakan untuk aktivitas rekreasi, tetapi juga sebagai tempat untuk berkumpul dan melakukan kegiatan sosial. Sebanyak 72% responden menyatakan pentingnya menyediakan fasilitas olahraga di ruang publik, seperti lapangan basket atau futsal, sementara 65% responden menginginkan area bermain anak yang aman dan nyaman. Terdapat juga permintaan yang tinggi untuk keberadaan kafe atau warung kecil yang dapat menjadi tempat interaksi sosial dan pusat kegiatan ekonomi mikro bagi warga setempat. Selain itu, masyarakat juga berharap ada area yang dapat digunakan untuk kegiatan budaya dan seni lokal, sebagai bentuk pelestarian budaya dan pengembangan kreativitas masyarakat.

Sebagian besar responden juga mengungkapkan harapan agar ruang publik dapat menjadi tempat yang mendukung keberagaman aktivitas yang dapat melibatkan seluruh lapisan masyarakat, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Mereka berharap ruang publik tidak hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan pembelajaran. Banyak yang menyarankan adanya program-program kegiatan komunitas yang dapat mempererat hubungan sosial antarwarga, seperti pelatihan keterampilan, festival budaya, dan kegiatan sosial lainnya. Sebanyak 58% responden menilai pentingnya penyediaan ruang yang dapat digunakan untuk kegiatan kreatif seperti pameran seni, workshop, atau kegiatan musik, yang dapat mengangkat potensi budaya lokal dan mendorong perkembangan ekonomi kreatif di tingkat komunitas.

Namun, di sisi lain, sebagian warga juga menyoroti pentingnya aspek aksesibilitas dan kenyamanan dalam desain ruang publik tersebut. Mereka menginginkan ruang publik yang ramah bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas, dengan penyediaan jalur khusus dan fasilitas yang dapat memudahkan mobilitas mereka. Selain itu, mereka juga berharap ada perhatian lebih terhadap masalah kebersihan dan pemeliharaan ruang publik yang berkelanjutan, dengan melibatkan masyarakat dalam upaya menjaga fasilitas yang ada. Sejumlah besar warga mengungkapkan keinginan agar pemerintah daerah memberikan pelatihan atau edukasi mengenai cara merawat ruang publik, sehingga keberlanjutan dan kualitas ruang dapat terjaga dalam jangka panjang.

## 3. Model Ruang Publik yang Diharapkan Masyarakat

Berdasarkan analisis tematik dan hasil wawancara dengan informan kunci, model ruang publik yang diinginkan masyarakat mencakup beberapa elemen utama. Pertama, model ruang publik harus memperhatikan aksesibilitas yang memadai untuk semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dengan menyediakan jalur khusus dan fasilitas yang mendukung kenyamanan mereka. Kedua, desain ruang publik yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal sangat penting untuk menjaga identitas kawasan tersebut. Masyarakat di kawasan Allepolea dan Maccini Baji menginginkan adanya ruang yang tidak hanya berfungsi untuk aktivitas fisik dan sosial, tetapi juga dapat menjadi tempat yang mencerminkan budaya lokal, seperti tempat untuk menggelar acara seni dan budaya.

Ketiga, model ruang publik yang diusulkan perlu mencakup elemen keberlanjutan lingkungan, seperti ruang terbuka hijau dan taman yang dapat mengurangi polusi udara serta menciptakan iklim mikro yang nyaman bagi masyarakat. Keempat, integrasi fasilitas umum yang memadai, seperti tempat duduk, area bermain anak, fasilitas olahraga, dan titik pertemuan komunitas, sangat diinginkan untuk mendukung berbagai aktivitas sosial. Terakhir, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pemeliharaan ruang publik juga sangat penting untuk keberlanjutan ruang publik itu sendiri. Banyak

warga yang menyatakan keinginan mereka untuk dilibatkan dalam pengelolaan ruang publik melalui kegiatan gotong royong dan program pelatihan untuk merawat fasilitas umum.

Penting pula untuk mempertimbangkan aspek keamanan dan pencahayaan dalam model ruang publik yang ideal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat merasa lebih nyaman berada di ruang publik yang memiliki pencahayaan memadai, terutama pada malam hari. Penerangan jalan yang baik tidak hanya meningkatkan rasa aman, tetapi juga memperpanjang waktu pemanfaatan ruang publik oleh masyarakat. Selain itu, keberadaan petugas keamanan atau sistem pengawasan berbasis teknologi seperti CCTV juga dianggap sebagai kebutuhan penting guna mencegah tindakan kriminal dan menjaga ketertiban lingkungan. Dalam konteks kawasan pemukiman yang sebelumnya merupakan kawasan kumuh, peningkatan rasa aman ini menjadi kunci dalam menciptakan ruang yang benar-benar inklusif dan ramah bagi semua kalangan.

Model ruang publik benar-benar dapat menjawab kebutuhan masyarakat, maka pendekatan berbasis komunitas (*community-based approach*) sangat direkomendasikan. Dengan melibatkan warga secara langsung dalam proses perencanaan, desain, hingga pengelolaan, ruang publik akan memiliki nilai sosial yang lebih tinggi dan mendorong rasa memiliki yang kuat dari masyarakat. Pendekatan ini juga memungkinkan munculnya inovasi lokal yang relevan dengan karakteristik sosial dan budaya setempat. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat akan membantu mengidentifikasi potensi dan kendala yang mungkin tidak terlihat dari sudut pandang pemerintah atau perencana. Oleh karena itu, kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, akademisi, dan sektor swasta menjadi kunci dalam mewujudkan ruang publik yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada kearifan lokal.

#### 4. Model Alternatif Pengembangan Ruang Publik

Berdasarkan hasil analisis data dan kebutuhan masyarakat yang teridentifikasi, model pengembangan ruang publik yang dapat diterapkan di kawasan Allepolea dan Maccini Baji mencakup beberapa elemen desain sebagai berikut:

- a. Ruang Terbuka Hijau  
Penyediaan lebih banyak ruang terbuka hijau yang dapat digunakan untuk berbagai aktivitas, seperti taman bermain anak, area olahraga, dan tempat bersantai. Ruang ini akan dirancang dengan mempertimbangkan kenyamanan lingkungan dan keberlanjutan, seperti penggunaan tanaman lokal yang mudah dipelihara dan dapat menambah keindahan ruang.
- b. Fasilitas Sosial dan Ekonomi  
Penyediaan fasilitas yang mendukung kegiatan ekonomi mikro, seperti kios atau warung, yang memungkinkan masyarakat lokal untuk berjualan dan berinteraksi. Selain itu, fasilitas olahraga seperti lapangan basket dan futsal juga sangat penting untuk mendorong partisipasi aktif warga dalam kegiatan fisik.
- c. Tempat untuk Kegiatan Budaya  
Penyediaan area khusus untuk kegiatan budaya dan seni, seperti panggung terbuka, galeri seni, atau ruang pertunjukan, yang memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan diri dan melestarikan budaya lokal. Keberlanjutan dan Pemeliharaan: Penerapan prinsip keberlanjutan dalam desain ruang publik, seperti penggunaan bahan ramah lingkungan dan efisien energi, serta melibatkan masyarakat dalam pemeliharaan ruang publik untuk memastikan keberlanjutan dan kenyamanan ruang dalam jangka panjang.

#### 5. Tantangan dan Rekomendasi

Meskipun ada banyak potensi dalam pengembangan ruang publik di kawasan Allepolea dan Maccini Baji, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya merawat ruang publik, yang berpotensi menyebabkan kerusakan fasilitas yang ada. Selain itu, kurangnya anggaran untuk pengembangan dan pemeliharaan ruang publik menjadi kendala utama dalam implementasi model yang diusulkan. Oleh karena itu,

direkomendasikan agar pemerintah daerah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan ruang publik, serta mencari sumber pendanaan alternatif seperti kemitraan dengan sektor swasta untuk mendukung pengembangan ruang publik yang lebih baik.

Tantangan lainnya adalah kurangnya koordinasi antara berbagai pihak terkait dalam perencanaan dan pengelolaan ruang publik. Meskipun telah ada upaya dari pemerintah untuk menata kawasan kumuh, implementasi kebijakan yang tidak terkoordinasi dengan baik seringkali menghambat optimalisasi penggunaan ruang publik. Hal ini dapat terlihat dari ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan yang diterapkan, serta minimnya perhatian terhadap keberlanjutan pengelolaan ruang publik pasca pembangunan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melibatkan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dalam proses perencanaan dan pengelolaan ruang publik, guna menciptakan ruang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Selain itu, ada juga tantangan terkait aksesibilitas dan inklusivitas ruang publik. Beberapa area di kawasan tersebut masih sulit dijangkau oleh semua kalangan, terutama oleh mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau lansia. Pengembangan ruang publik yang tidak sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas menjadi kendala dalam menciptakan ruang publik yang inklusif. Oleh karena itu, desain ruang publik perlu memperhatikan prinsip universal design yang memungkinkan semua orang, tanpa terkecuali, dapat menikmati fasilitas yang ada dengan nyaman dan aman. Dengan demikian, pengembangan ruang publik yang lebih baik tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga menciptakan rasa kebersamaan dan kepemilikan terhadap ruang yang telah disediakan. Secara keseluruhan, Taman Kota Enrekang sudah cukup memperhatikan beberapa prinsip arsitektur kontekstual dalam desainnya, namun masih terdapat ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Penelitian ini menunjukkan bahwa taman ini dapat menjadi contoh yang baik dalam memadukan desain ruang publik dengan pendekatan yang responsif terhadap lingkungan, budaya, dan sosial lokal. Dengan beberapa perbaikan dan penambahan elemen yang lebih kontekstual, taman ini dapat meningkatkan kualitas pengalaman pengguna dan memberi dampak positif terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa penataan kawasan kumuh di Allepolea dan Maccini Baji telah memberikan dampak positif terhadap kualitas ruang publik dan kehidupan sosial masyarakat. Perbaikan infrastruktur dasar serta penyediaan fasilitas umum telah meningkatkan kenyamanan dan rasa aman warga dalam memanfaatkan ruang publik. Namun, tantangan seperti kurangnya partisipasi masyarakat, terbatasnya anggaran, dan minimnya kesadaran terhadap pemeliharaan fasilitas masih menjadi kendala yang harus diatasi. Model ruang publik yang diinginkan masyarakat adalah ruang yang inklusif, multifungsi, mencerminkan budaya lokal, ramah lingkungan, serta dapat dikelola secara berkelanjutan melalui keterlibatan komunitas. Integrasi elemen-elemen seperti aksesibilitas, keamanan, fasilitas umum, dan keberlanjutan menjadi dasar utama dalam perumusan model ruang publik alternatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pasca penataan kawasan kumuh.

Untuk mewujudkan model ruang publik yang ideal tersebut, diperlukan sinergi antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat lokal, hingga sektor swasta dan akademisi. Pemerintah berperan sebagai fasilitator utama dalam menyediakan kebijakan dan anggaran, sementara masyarakat berperan aktif dalam merancang, menggunakan, dan merawat ruang publik. Keterlibatan akademisi dapat memberikan kontribusi dalam bentuk kajian perencanaan yang berorientasi pada kebutuhan lokal dan berbasis data. Di sisi lain, keterlibatan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) atau skema pembiayaan kreatif dapat menjadi alternatif untuk menutupi keterbatasan dana pemerintah dalam pembangunan dan pemeliharaan ruang publik. Lebih jauh, ruang publik tidak hanya dilihat sebagai ruang fisik semata, tetapi juga sebagai ruang sosial yang mendorong

koheisi sosial dan pemberdayaan komunitas. Oleh karena itu, pengembangan ruang publik sebaiknya tidak bersifat top-down, tetapi berbasis pada potensi, aspirasi, dan karakteristik budaya lokal. Kegiatan berbasis komunitas seperti festival budaya, pelatihan warga, dan aktivitas seni di ruang publik dapat menjadi media untuk menghidupkan kembali ruang tersebut sekaligus memperkuat identitas lokal. Dengan demikian, ruang publik pasca penataan kawasan kumuh tidak hanya berfungsi sebagai tempat berkumpul, tetapi juga sebagai wahana tumbuhnya solidaritas sosial dan inovasi komunitas yang berdampak jangka panjang terhadap kualitas hidup warga.

#### Saran

Pemerintah daerah disarankan untuk mengadopsi pendekatan partisipatif dalam setiap tahap pengembangan ruang publik, mulai dari perencanaan hingga pengelolaan. Pelibatan masyarakat secara aktif akan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab dalam menjaga ruang bersama. Selain itu, perlu dilakukan edukasi dan kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perawatan fasilitas publik. Pemerintah juga perlu menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah guna mencari alternatif pembiayaan dan dukungan teknis dalam pengembangan ruang publik. Terakhir, disarankan agar pengembangan ruang publik tidak hanya berorientasi pada fisik semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, budaya, dan lingkungan, sehingga ruang tersebut benar-benar dapat berfungsi sebagai tempat interaksi, inklusi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Selain itu, pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap kondisi ruang publik juga sangat penting dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas penataan kawasan kumuh. Pemerintah daerah perlu membentuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk memantau perkembangan pasca penataan, serta mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul. Tim ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan atau penyesuaian kebijakan berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh. Dengan pendekatan ini, diharapkan ruang publik yang telah ditata dapat terus berkembang dan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta dapat mengadaptasi perubahan yang terjadi seiring waktu.

Selain itu, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam hal pengelolaan ruang publik juga perlu dilakukan. Pelatihan bagi pengelola ruang publik dan komunitas lokal dapat membantu meningkatkan kemampuan dalam merawat dan memelihara ruang tersebut. Dengan adanya keterampilan dan pengetahuan yang memadai, pengelolaan ruang publik akan lebih efisien dan efektif. Pemerintah juga harus memastikan adanya sistem pemeliharaan yang terstruktur dan berkelanjutan, guna menjaga agar fasilitas publik tetap dalam kondisi yang baik dan dapat terus digunakan oleh masyarakat dalam jangka panjang.

## Daftar Pustaka

- Aliyah, I. (2019). PEMAHAMAN KONSEPTUAL PASAR TRADISIONAL DI PERKOTAAN. *Cakra Wisata*, 18(2). <https://jurnal.uns.ac.id/cakra-wisata/article/view/34367>
- Amri Perangin Angin. (2024). *ARSITEKTUR BERKELANJUTAN: TANTANGAN DAN INOVASI MENUJU BANGUNAN RAMAH LINGKUNGAN* | *WriteBox*. 1(3). <https://writebox.cloud/index.php/wb/article/view/80>
- Anggaran Biaya Untuk Pembangunan Pasar Dengan Fasilitas Ramah Lingkungan Kelurahan Talang Putri Ilham Akbari, R. DI, & Rosyad, F. (2025). RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) UNTUK PEMBANGUNAN PASAR DENGAN FASILITAS RAMAH LINGKUNGAN DI KELURAHAN TALANG PUTRI. *Ensiklopedia Research and Community Service Review*, 4(2), 110–114. <https://doi.org/10.33559/ERR.V4I2.2938>
- Ardiansyah Pulungan. (2024). *Arsitektur dan Penggunaan Ruang Publik: Membangun Lingkungan yang Ramah Pengguna* | *WriteBox*. 1(3). <https://writebox.cloud/index.php/wb/article/view/101>

- Astutik, M. C., & Suharto, B. (2025). Pasar Malam Sebagai Ruang Publik Perkotaan Perannya Dalam Dinamika Sosial dan Ekonomi. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(4), 4494. <https://doi.org/10.36418/SYNTAX-LITERATE.V10I4.58719>
- Ayu, A. P., & Alibasyah, H. (2019). REPRESENTASI PASAR TUMPAH DI SURYAKENCANA BOGOR SEBAGAI REALITAS SOSIAL DALAM KARYA SKETSA. *Jurnal Seni Nasional Cikini*, 5(2), 22–35. <https://doi.org/10.52969/JSNC.V5I2.80>
- Baharuddin, H., Haq, I., & Amalia, A. A. (2025). Analisis Kawasan Negative List Sebagai Arahan Penentuan Lahan Aman Bagi Pengembangan Perumahan dan Permukiman. *Jurnal Linears*, 8(1). <https://doi.org/10.26618/J-LINEARS.V8I1.17373>
- Bevani, F. N., Poerana, A. F., & Arindawati, W. A. (2025). Analisis Model P-Proses Dalam Komunikasi Pedagang Kaki Lima Pada Program Relokasi. *Jurnal Dinamika Ilmu Komunikasi*, 11(1), 52–66. <https://doi.org/10.32509/DINAMIKA.V11I1.5329>
- Denni Setiawan, 13512206. (2020). *RE-DESAIN TAMAN KULINER CONDONGCATUR DENGAN PENDEKATAN RUANG PUBLIK KREATIF*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/20419>
- Effendy, R. (2014). MENGURAI POTENSI RUANG PUBLIK LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK DALAM UPAYA DEMOKRATISASI MASYARAKAT LOKAL. *REFORMASI*, 4(2), 111. <https://doi.org/10.33366/RFR.V4I2.57>
- Gazali, M. (2017). Seni Mural Ruang Publik dalam Konteks Konservasi. *Imajinasi : Jurnal Seni*, 11(1), 69–76. <https://doi.org/10.15294/IMAJINASI.V11I1.11190>
- Haq, I., Asrini, & Nurul Ramadhan, N. (2024). OPTIMIZATION OF EMPLOYEE ATTENDANCE SYSTEM IN EFFORTS TO IMPROVE OPERATIONAL EFFICIENCY OF TIRTA NENE MALLOMO REGIONAL WATER COMPANY (PDAM) OPTIMALISASI SISTEM ABSENSI PEGAWAI DALAM UPAYA PENINGKATAN EFISIENSI OPERASIONAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM). *JAPMIS : JURNAL AKADEMIK PENGABDIAN MASYARAKAT ICHSAN SIDRAP*, 1, 1. <https://jeinsa.com/index.php/japmis/article/view/34>
- Haq, I., Kamaruddin, N., & Baharuddin, H. (2024). Tinjauan kualitas lingkungan dan kesejahteraan penghuni dalam konteks evaluasi purna huni bangunan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kecamatan Meritengngae. *Teknosains: Media Informasi Sains Dan Teknologi*, 18(3), 293–304. <https://doi.org/10.24252/TEKNOSAINS.V18I3.47557>
- Haq, I., & Nur, Y. (2024). OPTIMALISASI WISATA KAMPUNG SUSU DI KABUPATEN ENREKANG. *Arsitekno*, 11(2), 72–82. <https://doi.org/10.29103/ARJ.V11I2.16377>
- Haq, I., Radja, A. M., & Syam, S. (2023). Analysis of Comfort Level in Public Open Space Facilities at Anjungan Sungai Mata Allo Enrekang: Visitors' Perspective. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1272(1), 012010. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1272/1/012010>
- Haq<sup>1</sup>, I., Baharuddin<sup>2</sup>, H., & Kamaruddin<sup>3</sup>, N. (2024). ANALISIS LINGKUNGAN KOTA DI KECAMATAN MARITENGGAE, SIDENRENG RAPPANG. *Journal of Architecture Ichsan*, 1(1), 42–46. <https://ejurnal.unisan.ac.id/index.php/jari/article/view/1168>
- Hartanti, N. B., Gandarum, D. N., Prabowo, A. H., Murwonugroho, W., Afandi, N. N., & Khoirunisa, A. (2025). KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG PUBLIK DI PERMUKIMAN PADAT. *Jurnal AKAL: Abdimas Dan Kearifan Lokal*, 6(1), 82–102. <https://doi.org/10.25105/AKAL.V6I1.20983>
- Keadilan, G., & Jurnal, E. (2018). Urgensi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau sebagai Ruang Publik dalam Tata Kota Berwawasan Lingkungan Hidup. *Gema Keadilan*, 5(1), 52–73. <https://doi.org/10.14710/GK.2018.3648>
- Kusumowidagdo, A. (2005). ETIKA LINGKUNGAN PADA KARYA DESAIN INTERIOR. *Dimensi Interior*, 3(2). <https://doi.org/10.9744/INTERIOR.3.2>
- Laksitarini, N., Agus, D., & Purnomo, D. (2021). PENERAPAN RAGAM HIAS BATIK PECAH KOPI PADA INTERIOR HOTEL BERKONSEP MODERN SEBAGAI REPRESENTASI IDENTITAS BUDAYA LOKAL JAWA BARAT. *SENADA (Seminar Nasional Manajemen, Desain Dan Aplikasi Bisnis Teknologi)*, 4, 210–215. <https://eprosiding.idbbali.ac.id/index.php/senada/article/view/572>

- Manoto Sinambela. (2024). *ARSITEKTUR DAN KESEIMBANGAN EKOLOGIS: MENCIPTAKAN HUBUNGAN YANG HARMONIS DENGAN ALAM* | WriteBox. 1(3).  
<https://writebox.cloud/index.php/wb/article/view/105>
- Marselino, T. L. (2022). Kajian Ekspresi Diri pada Ruang Publik Dunia Maya dalam Perspektif Ontologis Layanan Internet World Wide Web. *KALBISCIENTIA Jurnal Sains Dan Teknologi*, 9(1), 14–23.  
<https://doi.org/10.53008/KALBISCIENTIA.V9I1.212>
- matamaros. (2023, November 3). *Permukiman Kumuh di Maros 105 Hektare, Pemkab Ingin Tambah Anggaran - Mata Maros*. Matamaros.Com.  
<https://www.matamaros.com/2023/11/03/permukiman-kumuh-di-maros-105-hektare-pemkab-ingin-tambah-anggaran/>
- Nugroho, A. C., Kurniawan, P., Agumsari, D., Nugroho, A. B., & Latifa, H. A. (2024). Kohesi Formal- Informal pada Ruang Terbuka Linear Jaringan Irigasi Kota Metro. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Teknik Dan Aplikasi Industri Fakultas Teknik Universitas Lampung*, 7.  
<https://sinta.eng.unila.ac.id/prosiding/index.php/ojs/article/view/138>
- Oktarina, P., Gaol, L., Penerapan, A., Bangunan, T. B., & Lingkungan, R. (2024). Penerapan Teknologi Bahan Bangunan Ramah Lingkungan dalam Desain Arsitektur. *Tugas Mahasiswa Program Studi Arsitek*, 1(1). <https://coursework.uma.ac.id/index.php/arsitek/article/view/789>
- Pengabdian Masyarakat Ichsan Sidenreng Rappang, J., Dafa fahrezi, N., Vivian Salsa Bila, A., Damayanti, F., Lana Zulkarnain, R., Pramana Syah Putra, A., Alfarez, F., Gilang Patria, A., & Tridata, A. (2024). CONSTRUCTION OF THE VILLAGE PEKAWATAN CEMETERY GATEWAY AS AN EFFORT TO DEVELOP SRIMINOSARI VILLAGE, LABUAN MARINGGAI DISTRICT. *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat Ichsan Sidrap*, 1(2), 86–91.  
<https://www.jeinsa.com/index.php/japmis/article/view/52>
- Politik, E., Pemanfaatan, D., Publik, R., & Haris, U. (2023). Etika Politik Dalam Pemanfaatan Ruang Publik. *Jurnal Administrasi Karya Dharma*, 2(1), 9–18.  
<https://www.jurnal.stiakdmerauke.ac.id/index.php/jakd/article/view/15>
- Prabowo, A. H., Gandarum, M. D. N., Hartanti, N. B., Murwonugroho, W., Moertiningsih, S., & Milvan, T. A. D. (2025). PENDEKATAN PLACEMAKING DALAM PERANCANGAN RUANG PUBLIK YANG LAYAK HUNI DI KELURAHAN KALIANYAR, JAKARTA. *Jurnal AKAL: Abdimas Dan Kearifan Lokal*, 6(1), 70–81. <https://doi.org/10.25105/AKAL.V6I1.20981>
- Pramesti1, P. U., Prabowo, B. N., Hasan, M. I., & Pramesti, P. U. (2019). KAJIAN RUANG DAN AKTIVITAS PASAR MINGGU TAMAN SETIABUDI BANYUMANIK TERHADAP TERBENTUKNYA KOHESI SOSIAL MASYARAKAT. *MODUL*, 19(2), 110–118. <https://doi.org/10.14710/MDL.19.2.2019.110-118>
- Purwanto, E. (2014). Privatisasi Ruang Publik dari Civic Centre menjadi Central Business District ( Belajar dari kasus Kawasan Simpang Lima Semarang). *TATALOKA*, 16(3), 153–167.  
<https://doi.org/10.14710/JVSAR.V>
- Rachmawati, N. F., & Aji, G. G. (2023). STRATEGI KOMUNIKASI PERSUASIF OLEH KOMUNITAS PEMUDA BERKAIN SURABAYA DALAM MELESTARIKAN KAIN TRADISIONAL. *The Commercium*, 7(1), 179–189. <https://doi.org/10.26740/TC.V7I1.55370>
- Rahman, S., Istiono, I., Mardiana, L., & Abdulrahman, W. (2009). ANALISIS PARTISIPASI DAN POLA KOMUNIKASI ANTARA MASYARAKAT DENGAN PEMERINTAH DALAM UPAYA MEMINIMALISASI KONFLIK PEMBANGUNAN. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 7(1), 61-69–61–69.  
<https://doi.org/10.36762/JURNALJATENG.V7I1.212>
- Rito, B. B. R. (2024). *MENJEMBATANI TEORI DENGAN PRAKTIK DALAM DESAIN LANDSKAP YANG INDAH DAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/54601>
- Sasoko, D. M., & Boangmanalu, J. Y. (2024). Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Relokasi PKL Di Sekitar Station Klender Baru Dan Sekitarnya. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 24(1), 27–31. <https://www.ejournal-jayabaya.id/Perspektif/article/view/231>
- Widiastuti, T. (2016). *KEPEMILIKAN MEDIA DAN DEMOKRASI DI ERA DIGITAL INFORMATION AGE*.

<http://jurnal.bakrie.ac.id/index.php/INDOCOMPAC/article/view/1642>